

SKRIPSI

DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh:

AGNES SESILIA DEWI PANGGESO

A011191150



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Sebagai salah satu persyaratan untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh:

AGNES SESILIA DEWI PANGGESO

A011191150



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

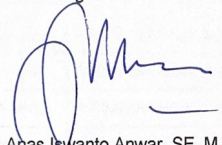
Disusun dan diajukan oleh

AGNES SESILIA DEWI PANGGESO
A011191150

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

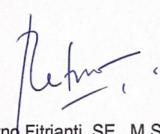
Makassar, 31 Oktober 2023

Pembimbing I



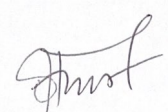
Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., M.A., CWM®
NIP 19630516 199003 1001

Pembimbing II



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®
NIP 19770913 200212 2002

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



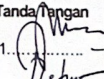


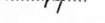
Dr. Sabir, SE, M.Si CWM®
NIP 19740715 20002121 003

SKRIPSI
DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA

Disusun dan diajukan oleh
AGNES SESILIA DEWI PANGGESO
A011191150

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
Pada tanggal 31 Oktober 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Anas Iswanto Anwar, SE.,MA.,CWM®	Ketua	1. 
2.	Dr. Retno Fitrianti, SE.,M.Si.,CWM®	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE.,MA.,CWM®	Anggota	3. 
4.	Dr. Sri Undai Nurbayani, SE.,M.Si.,CPF	Anggota	4. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Sabir, SE.,M.Si.,CWM®

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama Mahasiswa : AGNES SESILIA DEWI PANGGESO
Nomor Pokok : A011191150
Program Studi : Ekonomi Pembangunan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas
Hasanuddin
Jenjang : Sarjana (S1)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul ***DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA*** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak Cipta pihak lain. Apabila dikemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Oktober 2023

Yang menyatakan



(Agnes Sesilia Dewi
Panggeso)

A011191150

PRAKATA

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas berkat dan kasih karunia-Nya sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Determinan Inklusi Keuangan” dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini bukan hanya sebagai bentuk pemenuhan syarat untuk menyelesaikan studi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, akan tetapi penulisan skripsi ini berangkat dari keresahan akan masalah keuangan di lingkup sekitar, yang kemudian dituangkan dalam sebuah karya penelitian dalam bentuk skripsi yang ditulis dengan jujur dan sepuh hati oleh penulis dan sebagai wujud pengaplikasian ilmu yang telah penulis peroleh selama menjadi Mahasiswa.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu, Penulis dengan senang hati menerima setiap kritik dan saran dari pembaca, agar skripsi ini dapat berguna bagi masyarakat luas dengan membangkitkan semangat untuk melahirkan karya-karya yang baru. Dalam penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari partisipasi beberapa pihak terkait yang telah mendukung Penulis secara penuh. Untuk itu, penulis merasa wajib menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada mereka secara khusus sebagai berikut:

1. Tuhan Yesus atas kehendak dan kemurahan-Nya memberikan hati yang tulus, pemikiran, energi kepada setiap proses penyelesaian tugas akhir ini.
2. Mama, Papa, Kakak Feby, Kakak Lisa yang selalu membantu dan mensupport penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas segala dorongan, bantuan, cinta kasih yang diberikan selama menempuh masa perkuliahan dengan baik dan lancar.
3. Bapak Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM® selaku ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Fitriwati Djam'an, SE., M.Si selaku sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terimakasih atas segala bantuan yang senantiasa diberikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi.
4. Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM® selaku penasihat akademik penulis. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama perkuliahan di Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Anas Iswanto Anwar, SE., M.A., CWM® selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM® selaku dosen pembimbing II. Terimakasih untuk setiap kritik, saran, serta bimbingan penulis selama penyusunan skripsi.
6. Ibu Dr. Indraswati T.A.Reviane, SE., MA., CWM® dan Ibu Dr. Sri Undai Nurbayani, SE., M.Si., CPF selaku dosen penguji, terimakasih

untuk pertanyaan serta kritik dan saran yang membangun yang disampaikan pada saat seminar proposal dan ujian skripsi, dari hal itu penulis memperoleh banyak pengetahuan baru.

7. Seluruh Dosen FEB-UH yang telah memberi ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, nasehat kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Teruntuk Chandra David Buana Supriyadi yang telah membimbing, menemani penulis dalam melaksanakan penyelesaian skripsi ini. Membantu dalam suka dan duka, menemani bimbingan dan memberikan arahan kepada penulis.
9. Teruntuk sahabat saya dian, mayumi, patricia, jessica yang menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi dan mendengarkan keluh kesah selama duduk di bangku kuliah.
10. Kepada sahabat saya yang tercinta farah, kaka tamy, nure, vina, dilakecil, cecedila, ayu, feby, tiana yang mewarnai masa kuliah, terimakasih atas bantuan dan menjadi penyemangat selama masa perkuliahan dari semester 2 hingga proses penyelesaian skripsi ini. Semoga kedepannya semakin supportive dan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
11. Teruntuk farah kamila sahabat penulis yang menemani dari awal perkuliahan, dari semester 1 hingga sekarang yang tidak hentinya memberikan dukungan support dan pengertian kepada penulis. Semoga kedepannya tetap saling menguatkan dan saling support.

12. Untuk angela chandra sahabat penulis dari SMA yang telah membimbing dan menemani penulis dari awal daftar perkuliahan.
13. Sahabat KMK FEB UH yang telah menghibur penulis selama masa perkuliahan yang membawa dampak positif kepada penulis. Terima kasih telah memberikan pengertian, kasih sayang dan sahabat yang setia kepada penulis.
14. Teruntuk ardi yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, dapat membimbing penulis hingga skripsi ini berjalan dengan lancar.
15. Dan tentunya kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang dengan tulus memberikan motivasi serta doa sehingga atas izin Tuhan Yesus skripsi ini dapat terselesaikan.

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. Amin

Makassar, 1 Juni 2023

Agnes Dewi

ABSTRAK**DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN**

Agnes Sesilia Dewi Panggeso

Anas Iswanto Anwar

Retno Fitrianti

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pdrb per kapita, ketimpangan pendapatan dan pengangguran terbuka terhadap Inklusi Keuangan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersifat kuantitatif dalam bentuk angka yang diperoleh oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kombinasi dari data time series dan cross section atau data panel tahun 2019 dan 2022. Metode analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pdrb per kapita berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan akan tetapi ketimpangan pendapatan dan pengangguran berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan.

Kata Kunci: Pdrb Per Kapita, Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran, Inklusi Keuangan

ABSTRACT

DETERMINAN OF FINANCIAL INCLUSION

Agnes Sesilia Dewi Panggeso

Anas Iswanto Anwar

Retno Fitrianti

This study aims to analyze the effect of gdp per capita income inequality and open unemployment on Financial Inclusion. The data used in this study is secondary data which is quantitative in the form of numbers obtained by the financial services authority (OJK) and the central bureau of statistics (BPS). The data used in this study is a combination of the time series data and cross section or panel data for 2019 and 2022. The analytical method used is the panel data regression method. The results of this study indicate that the gdp per capita variable has a positive effect on financial inclusion, but income inequality and unemployment have a negative effect on financial inclusion.

Keywords: GDP Per Capita, Income inequality, Unemployment, Financial Inclusion.

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
PRAKATA	iv
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1. Inklusi Keuangan	12
2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita.....	13
2.1.3. Ketimpangan Pendapatan	14
2.1.4 Pengangguran.....	16
2.2 Hubungan Antar Variabel	17
2.2.1 Hubungan antara PDRB per kapita terhadap Inklusi Keuangan	17
2.2.2 Hubungan antara Ketimpangan pendapatan terhadap Inklusi Keuangan	18
2.2.3 Hubungan antara Pengangguran terhadap Inklusi Keuangan	19
2.3 Tinjauan empiris	20
2.4 Kerangka pikir penelitian	22
2.5 Hipotesis Penelitian	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Lokasi Penelitian.....	23
3.2 Jenis dan Sumber Data	23
3.3 Metode Pengumpulan data.....	23
3.4 Metode Analisis Data	23
3.6 Uji Asumsi Klasik	26
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	29
4.1. Gambaran Hasil Penelitian	29

4.1.1	Perkembangan Inklusi Keuangan	29
4.1.2	Perkembangan Produk Domestik Bruto Per kapita.....	31
4.1.3	Perkembangan Ketimpangan Pendapatan	33
4.1.4	Perkembangan Pengangguran	36
4.2	Pengujian Model Regresi Data	38
4.2.1	Common Effect Model (CEM)	39
4.2.2	Fixed Effect Model (FEM)	39
4.2.3	Random Effect Model (REM)	40
4.2.4	Uji Chow	40
4.2.5	Uji LM	41
4.3	Uji Asumsi Klasik	42
4.3.1	Uji Multikolinieritas	42
4.3.2	Uji Heteroskedastisitas.....	43
4.4	Hasil Estimasi	43
4.5	Pengaruh Hasil Penelitian	46
4.5.1	Pengaruh PDRB per kapita terhadap Inklusi Keuangan	46
4.5.2	Pengaruh Ketimpangan Pendapatan terhadap Inklusi Keuangan	47
4.5.3	Pengaruh Pengangguran terhadap Inklusi Keuangan	49
BAB V	PENUTUP	51
5.1	Kesimpulan	51
5.2	Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Presentase Literasi dan Inklusi Keuangan Responden Tahun 2022	6
Gambar 1. 2 Perkembangan Gini Ratio / Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode Maret 2019- Maret 2022	9
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian.....	22
Gambar 4. 1 Inklusi Keuangan Berdasarkan Provinsi Tahun 2019 dan 2022	30
Gambar 4. 2 PDRB Per Kapita Provinsi tahun 2019 dan 2022 Berdasarkan harga konstan (ribu rupiah).....	32
Gambar 4. 3 Gini Ratio Provinsi Indonesia tahun 2019 dan 2022 (%).....	35
Gambar 4. 4 Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi Tahun 2019 dan 2022 (jumlah).....	37
Gambar 4. 5 Hasil Heteroskedastisitas	43

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Hasil Regresi dengan pendekatan CEM	39
Tabel 4. 2 Hasil Regresi dengan pendekatan FEM	40
Tabel 4. 3 Hasil Regresi dengan pendekatan REM	40
Tabel 4. 4 Hasil Uji Chow	41
Tabel 4. 5 Hasil Uji LM.....	42
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinieritas	42
Tabel 4. 7 Hasil Estimasi Regresi dengan pendekatan CEM.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara berkembang dengan perekonomian yang cukup baik. Berdasarkan *overview* ekonomi Bank Dunia, Indonesia adalah negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Hal tersebut didasari oleh keberhasilan Indonesia menjadi negara dengan pendapatan perkapita yang terus meningkat setiap tahun dimana dari 8,7 Triliun di tahun 2000 menjadi 56 Triliun Rupiah pada 2014. Jika dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi. Dimana pada tahun 2010 tumbuh sebesar 6.1% dan meningkat pada tahun 2011 menjadi 6.2% dan pada tiga tahun berikutnya mengalami perlambatan dimana pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya sebesar 5%. Perlambatan ekonomi Indonesia ini disebabkan oleh banyak faktor baik faktor dalam negeri ataupun faktor guncangan ekonomi internasional yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Walaupun ekonomi Indonesia mengalami perlambatan tetapi masih dalam keadaan baik. Saat ini, Indonesia adalah keempat negara berpenduduk terbesar di dunia dan ekonomi terbesar ke-10 dalam hal paritas daya beli, dan anggota dari G-20. Bank Dunia (2015).

Salah satu keberhasilan pembangunan suatu negara ditandai dengan terciptanya suatu sistem keuangan yang inklusif dan memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat (Hartati dan Azwar, 2017). Inklusi keuangan adalah instrumen perbankan yang memegang peranan penting dalam stabilitas sistem keuangan melalui akses dan layanan keuangan (Rusdianasari, 2018). Indonesia

menjadikan keuangan inklusif menjadi strategi nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penurunan tingkat kemiskinan, distribusi pendapatan yang merata, dan stabilitas sistem keuangan (Hadad, 2010 dalam Hartati dan Azwar, 2017). Zona perbankan ialah zona yang memahami industri keuangan Indonesia. Perbankan mempunyai peninggalan terbanyak dibandingkan dengan Lembaga keuangan yang terdapat di industri keuangan Indonesia ialah menggapai Rp. 4.330 Triliun ataupun 78 persen dari total peninggalan industri keuangan pada tahun 2012. Dikala ini zona perbankan di Indonesia hadapi pertumbuhan yang positif, perihal ini bisa dilihat dari pertumbuhan PDB di Indonesia yang tiap tahunnya terus bertambah. Donasi zona perbankan terhadap PDB Indonesia tahun 2013 menggapai Rp. 113 Triliun, sebaliknya pada tahun 2007 cuma menggapai Rp. 78 Triliun (BPS 2014).

Bersamaan dengan berkembangnya zona perbankan, distribusi layanan jasa perbankan pula wajib menyeluruh. Walaupun jumlah kantor cabang bank, DPK yang terhimpun, dan kredit yang disalurkan terus menjadi bertambah, tetapi masih ada warga Indonesia yang belum bisa mengakses jasa perbankan. Berdasarkan data Global Financial Index World Bank tahun 2011, jumlah penduduk dewasa di Indonesia baik yang memiliki rekening, menabung, atau meminjam di lembaga keuangan formal, salah satunya sektor perbankan, pada tahun 2011 masih di bawah 20%. Jasa keuangan formal sulit diakses terutama oleh penduduk desa sehingga mereka memilih untuk meminjam dan menabung di lembaga keuangan informal (Anggraeni 2009). Dikala ini, Inklusi keuangan sudah jadi jadwal berarti di bermacam negeri tercantum Indonesia. Pada bulan Juni 2012 Bank Indonesia berkolaborasi dengan sekretariat wakil Presiden Regu Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) serta Tubuh Kebijakan Fiskal

Kementrian Keuangan menghasilkan Strategi Nasional Keuangan Inklusif. Dengan terdapatnya program ini pemerintah bisa kurangi angka kemiskinan serta pembangunan ekonomi yang inklusif serta berkepanjangan. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif, strategi keuangan inklusif dijabarkan dalam 6 pilar ialah bimbingan keuangan, fasilitasi keuangan publik, pemetaan data keuangan, kebijakan/ peraturan pendukung, sarana intermediasi serta distribusi, dan proteksi konsumen. Oleh sebab itu, dibutuhkan kenaikan akses layanan warga yang menuju pada pemenuhan layanan bawah warga paling utama pada zona keuangan lewat inklusi keuangan. Inklusi keuangan sudah jadi jadwal reformasi dunia sebab mempunyai kemampuan yang besar dalam memutus lingkaran setan kemiskinan serta merendahkan ketimpangan pemasukan secara totalitas. Penyusutan perkembangan ekonomi ini diiringi oleh penyusutan pada bermacam bidang kehidupan warga, salah satunya merupakan ketimpangan pemasukan yang diperburuk dengan keadaan kemiskinan ekstrim.

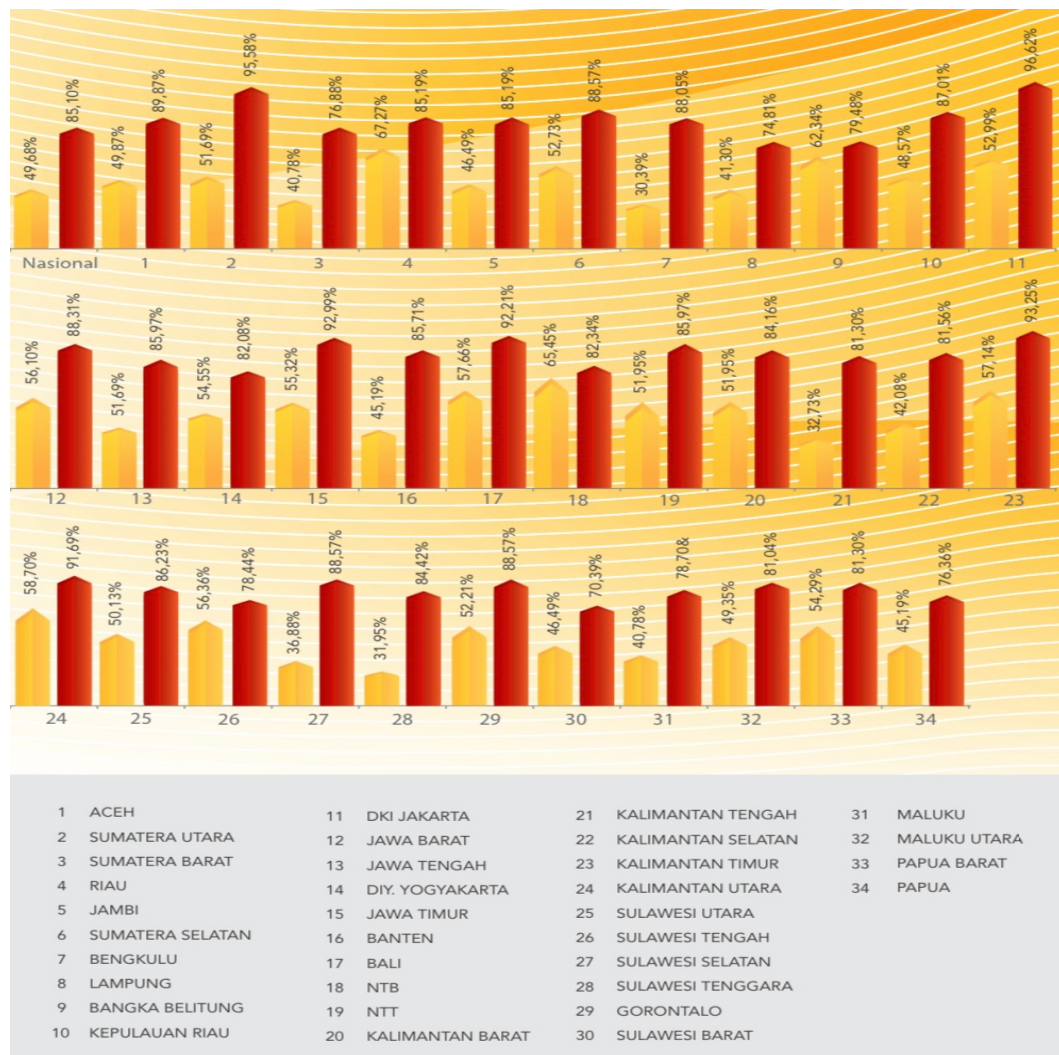
Setelah menetapkan enam pilar strategi nasional keuangan Inklusif maka perlu menetapkan siapa yang menjadi target dari strategi tersebut. Target utama dari strategi ini adalah kelompok migran dan penduduk daerah terpencil yang masuk dalam kategori masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan dalam akses keuangan. Setelahnya hal terpenting adalah tujuan dari strategi ini adalah menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Keuangan yang semakin inklusif dapat memberikan akses terhadap jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, terutama bagi kelompok miskin dan marjinal yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.

Masyarakat miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kondisi hidupnya menjadi lebih sejahtera dengan mengakses layanan keuangan. Hal ini dapat mendorong pendapatan masyarakat miskin semakin meningkat sehingga kesenjangan pendapatan dapat berkurang. Hal ini dapat didukung oleh Rakhmindyarto dan Syaifullah (2014:1) bahwa sistem keuangan yang inklusif akan mampu memberdayakan individu untuk mampu mengakses layanan keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun dan fasilitas pembayaran, sehingga sangat membuat masyarakat khususnya kelompok berpendapatan rendah untuk meningkatkan pendapatannya, mengakumulasikan kekayaannya, dan mengelola risiko, serta upaya untuk keluar dari kemiskinan.

Indikator penetrasi bank adalah sejauh mana setiap orang dalam suatu perekonomian memiliki rekening bank. Dimana dalam hal ini menggunakan rekening bank sebagai proporsi dari total penduduk sebagai indikator dari penetrasi perbankan. Indikator ketersediaan akses hal ini berkaitan dengan ketersediaan layanan perbankan ditunjukkan dengan jumlah outlet bank atau nomor ATM yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Apabila masyarakat semakin bisa menjangkau akses perbankan maka akan membudayakan individu yang dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan untuk indikator kegunaan (usage) untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap penggunaan produk-produk perbankan dalam aktivitas perekonomian. Hal tersebut diperlukan karena tingkat literasi keuangan yang rendah menyebabkan "*unbanked people*" maka pemahaman terhadap produk-produk perbankan juga masih rendah.

Inklusi keuangan berperan penting dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur keuangan yang kuat dan efisien yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kehadiran inklusi keuangan dapat mencegah munculnya sektor keuangan yang tidak terorganisir dan eksploitatif (Sharma, 2016). Pembuat kebijakan di berbagai negara telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Inklusi keuangan ini telah menjadi prioritas kebijakan bagi sektor keuangan. Menurut McKinsey Global Institute, inklusi keuangan telah terbukti berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan dan tujuan pembangunan yang lebih luas. Selain itu, inklusi keuangan dapat membangun sistem keuangan yang stabil dan memobilisasi sumber daya domestik melalui tabungan nasional sehingga meningkatkan pendapatan nasional (UNCDF, 2021).

Sistem layanan keuangan yang inklusif dapat membawa banyak manfaat. Pertama, soal akses. Akses ke dana kredit secara otomatis akan membuka peluang bisnis yang dapat digunakan untuk meningkatkan ukuran investasi pengusaha kecil. Kedua, membuka jaringan ke sektor keuangan formal memanfaatkan berbagai pilihan tabungan, serta persyaratan yang menguntungkan untuk berbagai produk asuransi. Ketiga, dari segi biaya kemudahan akses modal usaha di sektor keuangan formal, hal ini akan menurunkan pertumbuhan kredit di sektor informal yang seringkali dijalankan oleh para tengkulak yang kerap menetapkan cicilan kredit yang tidak wajar. Kehadiran lembaga keuangan formal diperkirakan akan mengurangi biaya cicilan kredit yang harus ditanggung masyarakat miskin.



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2022

Gambar 1. 1 Presentase Literasi dan Inklusi Keuangan Responden Tahun 2022

Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68% naik dibanding tahun 2019 yang hanya 38,03%, sementara indeks inklusi keuangan tahun ini mencapai 85,10% meningkat dibanding periode SNLIK sebelumnya di tahun 2019 yaitu 76,19%. Hal tersebut menunjukkan gap antara tingkat literasi dan tingkat inklusi semakin menurun, dari 38,16 persen di tahun 2019 menjadi 35,42% di tahun 2022.

Dalam penelitian ini menggunakan variable bebas untuk mengukur faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia antara lain ada PDRB, Ketimpangan Pendapatan, Pengangguran.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian diseluruh wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu satu tahun. PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian bagi pembangunan didaerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan nasional mengalami kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah serta semakin merajalela tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut akan berdampak pada naiknya tingkat kriminalitas dalam suatu daerah.

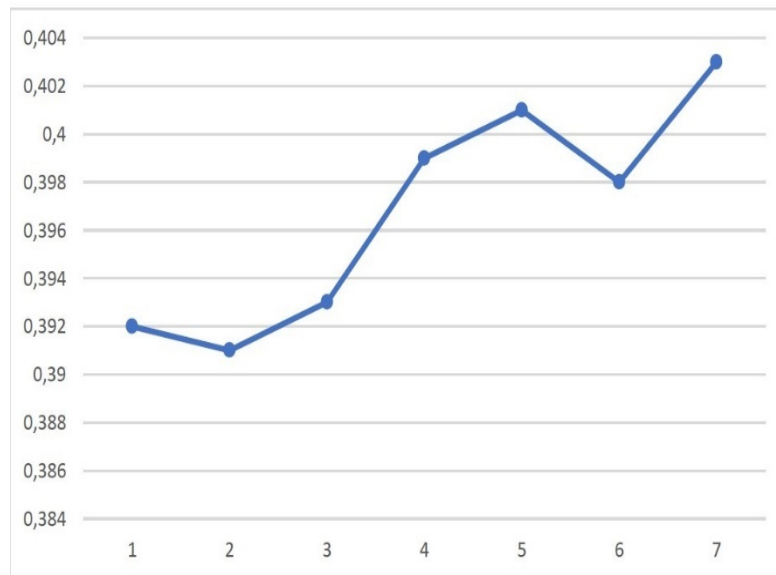
PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Besaran PDRB antar daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi faktor-faktor produksi yang dimiliki antar daerah bervariasi. Di dalam suatu perekonomian negara, antara sektor satu dengan sektor lainnya saling membutuhkan, baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu negara dalam periode satu tahun. Terdapat dua cara yang digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita, yaitu berdasarkan harga tetap dan berdasarkan harga yang sedang berlaku. Jika kita menghitung berdasarkan harga tetap maka hasilnya disebut dengan pendapatan per kapita riil. Sebaliknya apabila

kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang sedang berlaku maka hasilnya disebut dengan pendapatan perkapita nominal.

Ketimpangan pendapatan yang tinggi berdampak buruk bagi perekonomian. Birdsall (2006) menjelaskan dampak ketimpangan diantaranya adalah memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tingginya angka ketimpangan tersebut dapat mengurangi keempatan masyarakat yang berada pada persentil terendah dalam distribusi pendapatan untuk mengakses pendidikan dan kesehatan. Ketimpangan pendapatan juga memicu permasalahan sosial, keterbatasan dalam akses pendidikan dan menimbulkan pengangguran. Kondisi ini pada akhirnya dapat mendorong kenaikan tingkat kejahatan. Bank Dunia menjelaskan bahwa tingginya angka ketimpangan pendapatan suatu negara akan memperlambat pertumbuhan ekonominya (Astuti, 2013). Dengan fakta bahwa ketimpangan pendapatan yang tinggi memiliki dampak negatif terhadap perekonomian maka diperlukan strategi untuk mengurangi angka ketimpangan pendapatan. Salah satu strategi yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi ketimpangan pendapatan adalah pengembangan keuangan.

Berdasarkan sebagian besar pengukuran, ketimpangan di Indonesia telah mencapai tingkat yang tinggi. Pada tahun 2002, 10 persen warga terkaya di Indonesia mengonsumsi sama banyaknya dengan total konsumsi 42 persen warga termiskin, sedangkan pada tahun 2014 mereka mengonsumsi sama banyaknya dengan 54 persen warga termiskin (World Bank, 2016).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1. 2 Perkembangan Gini Ratio / Ketimpangan Pendapatan di Indonesia pada periode Maret 2019- Maret 2022

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang sering dihadapi oleh setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Masalah pengangguran ini memang selalu menjadi persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian Negara Indonesia. Jumlah penduduk yang bertambah semakin besar setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja. Tingginya tingkat pengangguran dalam suatu Negara dapat membawa dampak negatif terhadap perekonomian Negara tersebut. Menurut BPS pada sensus 2010 pengangguran didefinisikan sebagai orang yang masuk dalam angkatan kerja (15-64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Pengangguran terjadi karena pertumbuhan angkatan kerja lebih tinggi dari pertumbuhan lapangan pekerjaan yang ada. Pengangguran merupakan salah satu indikator penting di bidang ketenagakerjaan, dimana tingkat pengangguran dapat mengukur sejauh mana angkatan kerja mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada. Pengangguran yang tinggi dapat menjadi sumber utama kemiskinan, dapat

memicu kriminalitas yang tinggi serta dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang (Artiyan, 2013).

Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian mengenai “**DETERMINAN INKLUSI KEUANGAN DI INDONESIA**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka akan disajikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah PDRB Perkapita berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Indonesia?
2. Apakah Ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Indonesia?
3. Apakah Pengangguran berpengaruh terhadap inklusi keuangan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pengaruh inklusi keuangan terhadap pembangunan yang terjadi di Indonesia.

1. Untuk mengetahui pengaruh Pdrb perkapita terhadap inklusi keuangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ketimpangan pendapatan terhadap inklusi keuangan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan dan pengaplikasian ilmu pengetahuan teoritis yang telah ditempuh selama bangku perkuliahan.
3. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan pertimbangan kepada Lembaga keuangan, pemerintah maupun instansi yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Inklusi Keuangan

Keberhasilan pembangunan ditandai dengan terciptanya sistem keuangan yang memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Institusi keuangan memiliki peran penting melalui fungsi intermediasinya untuk mendorong perekonomian, pemerataan pendapatan, pengetasan kemiskinan serta pencapaian stabilitas sistem keuangan. Tetapi industri keuangan yang berkembang pesat belum disertai dengan akses ke keuangan yang memadai. Padahal akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting dalam keterlibatan masyarakat luas terhadap sistem perekonomian.

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP,2016) menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. Produk dan layanan jasa keuangan tersebut harus tersedia secara berkelanjutan dan teregulasi dengan baik. *Center for Financial Inclusion (CFI, 2016)* menjelaskan inklusi keuangan sebagai akses yang dimiliki oleh rumah tangga dan bisnis terhadap penggunaan produk dan layanan jasa keuangan secara efektif. *Center for Financial Inclusion (CFI,2016)* mendefinisikan inklusi keuangan sebagai akses terhadap produk keuangan yang sesuai termasuk kredit, tabungan, asuransi, dan pembayaran, tersedianya akses yang berkualitas termasuk kenyamanan, keterjangkauan, kesesuaian dan dengan memperhatikan perlindungan konsumen, serta ketersediaan tersebut juga diberikan kepada semua orang.

Definisi financial inclusion menurut World Bank yang dikutip dalam Supartoyo dan Kasmianti adalah sebagai suatu kegiatan menyeluruh yang bertujuan untuk menghilangkan segala bentuk hambatan baik dalam bentuk harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam menggunakan atau memanfaatkan layanan jasa keuangan (Supartoyo dan Kasmianti, 2013).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Keuangan inklusif adalah segala upaya yang bertujuan untuk meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan sehingga dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat terutama untuk daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau atau daerah perbatasan.

Menurut Durai dan Stella inklusi keuangan dapat didefinisikan sebagai proses memastikan akses layanan keuangan dan kredit yang dapat diakses oleh golongan lemah dan berpenghasilan rendah dengan biaya yang terjangkau (Durai dan Stella, 2019)

Menurut World Bank inklusi keuangan merupakan kemampuan individu atau kelompok yang dapat memiliki akses terhadap produk dan layanan. Layanan yang dimaksud tersebut formal yang bermanfaat dan terjangkau, serta mampu memenuhi kebutuhan mereka, seperti transaksi, pembayaran, tabungan, kredit dan asuransi.

2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Salah satu indikator penting dalam mengetahui kondisi perekonomian di suatu Negara dalam periode tertentu melalui data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga konstan maupun harga berlaku. Produk Domestik Bruto pada dasarnya merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan

oleh seluruh unit ekonomi pada suatu Negara tertentu. Produk domestic bruto (PDB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup yang lebih luas atau skala nasional sedangkan produk domestic regional bruto (PDRB) digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi lingkup lebih kecil atau skala regional.

PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Besaran PDRB antar daerah berbeda-beda, ini dikarenakan potensi faktor-faktor yang dimiliki antar daerah bervariasi. Di dalam suatu perekonomian Negara, antara sektor satu dengan sektor lainnya saling membutuhkan, baik dari bahan mentah maupun hasil akhirnya. Sektor industri memerlukan bahan mentah dari sektor pertanian dan pertambangan, hasil sektor industri dibutuhkan oleh sektor pertanian dan jasa-jasa.

Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk dalam suatu Negara dalam periode satu tahun. Terdapat dua cara yang digunakan dalam menghitung pendapatan per kapita, yaitu berdasarkan harga tetap dan berdasarkan harga yang berlaku. Jika kita menghitung berdasarkan harga tetap maka hasilnya disebut dengan pendapatan per kapita riil. Sebaliknya apabila kita menghitung pendapatan per kapita berdasarkan harga yang berlaku maka hasilnya disebut dengan pendapatan perkapita nominal.

2.1.3. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan terjadi di semua negara di dunia, baik negara maju maupun berkembang, baik yang lebih merata maupun yang tingkat ketimpangannya lebih rendah. Todaro menjelaskan situasi ini antara lain dengan fakta bahwa negara-negara maju memiliki distribusi pendapatan yang lebih merata daripada negara-negara dunia ketiga, yaitu negara-negara yang tergolong negara

berkembang (Todaro, 2013)

Ketimpangan atau disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu setiap daerah biasanya terdapat istilah daerah maju dan daerah terbelakang (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro menyatakan bahwa ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor produksi dan sumber daya yang tersedia. Perbedaan ini yang menyebabkan tingkat pembangunan dan distribusi pendapatan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut. (Kuncoro, 2006).

Pada dasarnya distribusi pendapatan merupakan suatu konsep yang membahas tentang penyebaran pendapatan setiap orang atau rumah tangga dalam masyarakat. Terdapat dua konsep pokok mengenai pengukuran distribusi pendapata, yaitu konsep ketimpangan absolut dan konsep ketimpangan relatif. Konsep ketimpangan absolut merupakan konsep pengukuran ketimpangan yang menggunakan parameter dengan suatu nilai mutlak. Sedangkan konsep ketimpangan relatif merupakan konsep pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang membandingkan besarnya pendapatan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dengan besarnya total pendapatan yang diterima oleh masyarakat secara keseluruhan (Sukirno, 2006)

2.1.4 Pengangguran

Menurut Ritonga dan Firdaus (2007) jenis-jenis pengangguran dikelompokkan menjadi 2 yaitu menurut jenis pengangguran menurut lama waktu kerja dan jenis pengangguran menurut penyebab terjadinya. Jenis pengangguran menurut lama waktu kerja terdiri dari pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai pekerjaan dan telah berusaha mencari pekerjaan secara maksimal, sementara lapangan kerja yang tersedia tidak cocok dengan latar belakang pendidikan atau malas mencari pekerjaan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima tetapi belum mulai bekerja

Faktor lain yang dapat dikaitkan dengan keuangan inklusi adalah pekerja (Sama dan Pias, 2011). Pekerja adalah faktor penting yang mempengaruhi keuangan inklusif. Pertama, peningkatan lapangan kerja baik formal maupun informal umumnya disertai dengan pertumbuhan pendapatan yang akan mengarah pada partisipasi sistem keuangan formal sehingga meningkatkan keuangan inklusi. Kedua, pekerjaan formal secara otomatis menghubungkan karyawan dengan sistem keuangan formal melalui upah dan *Automated Cash Transfer* (ACT). Sebaliknya, pengangguran atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan, akan sedikit kemungkinan untuk berpartisipasi dalam sistem keuangan (Lenka dan Bank, 2018).

Pengangguran merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi kelangsungan hidup manusia secara langsung. Bagi kebanyakan orang kehilangan pekerjaan merupakan penurunan suatu standar kehidupan. Jadi tidak

mengejutkan apabila pengangguran menjadi topik yang sering diperbincangkan dalam perdebatan politik oleh para politisi yang seringkali mengkaji bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu terciptanya lapangan pekerjaan (Mankiw,2000).

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan antara PDRB Perkapita terhadap Inklusi Keuangan

Dari penelitian ini PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Menurut Gracelia (2018) hasil penilaian memang menunjukkan bahwa file pertimbangan moneter di 33 daerah di Indonesia sangat mempengaruhi PDRB di setiap daerah. Ini menunjukkan bahwa peningkatan dalam pertimbangan moneter akan mendorong peningkatan GDP di setiap wilayah ini. Hasil ini juga menunjukkan wilayah dengan catatan pembayaran moneter yang tinggi akan sering memiliki tingkat perkembangan keuangan yang tinggi dan cepat.

PDRB memiliki pengaruh positif terhadap inklusi keuangan suatu daerah. Peningkatan PDRB merupakan salah satu cerminan dari pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan kinerja perekonomian membaik. Kondisi perekonomian yang baik menjadi signal bagi perbankan untuk memperluas jaringannya sehingga akses perbankan semakin terbuka. Selain itu, peningkatan PDRB juga dapat mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat. Semakin produktif masyarakat dalam berbagai kegiatan perekonomian, maka semakin besar peluang masyarakat untuk meningkatkan pendapatan. Dengan pendapatan yang meningkat, kesempatan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan semakin besar baik untuk menabung,

melakukan investasi ataupun untuk keperluan transaksi lainnya.

2.2.2 Hubungan antara Ketimpangan pendapatan terhadap Inklusi Keuangan

Tita & Aziakpono (2017) menjelaskan bahwa inklusi keuangan dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan bisa melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pengaruh langsung terjadi ketika masyarakat miskin ataupun yang berpendapatan rendah memperoleh kemudahan akses layanan keuangan formal dalam bentuk pembukaan rekening bank, kredit, asuransi, dan sistem pembayaran. Dengan adanya kepemilikan rekening dapat mendorong seseorang untuk melakukan manajemen resiko lebih baik, mengumpulkan modal, melakukan kredit, tabungan bahkan merubah pola konsumsi menjadi lebih baik. Dan apabila tabungan atau kredit yang terkumpul digunakan untuk usaha atau bisnis maupun meningkatkan pendidikan anak-anak, maka hal tersebut dapat berpotensi untuk menghindari kemiskinan di masa yang akan datang, sehingga pada akhirnya secara perlahan akan mengurangi jurang ketimpangan pendapatan yang terjadi.

Di sisi lain, pengaruh tidak langsung dari adanya inklusi keuangan terhadap ketimpangan pendapatan adalah melalui pasar tenaga kerja. Adapun untuk mengetahui bagaimana inklusi keuangan melalui saluran pasar tenaga kerja dalam mempengaruhi ketimpangan pendapatan dapat dilihat dari skala kemudahan akses layanan keuangan, kondisi ekonomi, dan produktivitas dari tenaga kerja yang ada. Apabila akses keuangan dapat menjangkau masyarakat secara luas, maka pengaruhnya terhadap kesenjangan pendapatan akan lebih luas. Hal tersebut dikarenakan ketika akses terhadap layanan keuangan semakin luas

maka akan meningkatkan kompetisi antara lembaga keuangan yang ada, sehingga akan mengurangi biaya dari produk layanan keuangan yang ditawarkan dan mampu meningkatkan kredit potensial terhadap pengusaha. Hal tersebut pada akhirnya akan memunculkan perusahaan rintisan atau start up yang seiring waktu akan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja.

Dalam jangka pendek, inklusi keuangan tidak terlalu berdampak dalam mengurangi ketimpangan pendapatan, dan bahkan akan memperlebar ketimpangan pendapatan ketika hanya sebagian pengusaha rintisan yang mampu menaikkan pendapatannya secara signifikan, sedangkan beberapa tidak mampu melakukan hal tersebut. Dalam jangka panjang, pada dasarnya inklusi keuangan secara bertahap mampu mengurangi ketimpangan pendapatan seiring dengan banyaknya pengusaha yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dengan menawarkan upah yang lebih tinggi. Dengan kata lain, naiknya upah sebagai akibat dari naiknya kompetisi dari proporsi inklusi keuangan yang lebih luas dalam menjangkau masyarakat akan berpengaruh terhadap perekonomian dan ketimpangan pendapatan (Tita & Aziakpono 2017).

2.2.3 Hubungan antara Pengangguran terhadap Inklusi Keuangan

Dari hasil penelitian bahwa variabel tingkat pengangguran terbuka berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia.

Beberapa dekade ini inklusi keuangan suatu negara terus mengalami kontribusi positif, dapat di ilustrasikan/dikaitkan apabila inklusi keuangan terus beranjak lebih baik maka akan ada penciptaan tambahan pekerjaan baru dan menandakan bagaimana inklusi keuangan terbukti akan mendorong upaya penurunan tingkat pengangguran di suatu negara terkhusus di Indonesia.

2.3 Tinjauan empiris

Sarma dan Pais (2011) dengan judul penelitian *Financial Inclusion and Development: A Cross Country Analysis* menunjukkan dari socio ekonomi GDP berpengaruh terhadap inklusi keuangan. Dari infrastruktur, panjang jalan, penggunaan telepon dan internet berpengaruh terhadap tingkat inklusi keuangan sedangkan pengguna computer, surat kabar dan radio tidak berpengaruh terhadap inklusi keuangan dari perbankan. NPA, CAR dan Asset Foreign memiliki pengaruh sedangkan Asset Government dan interest rate tidak memiliki pengaruh terhadap inklusi keuangan.

Chithra dan Selvam (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinants of Financial inclusion; an Empirical study on the inter state variations in India*. Hasil dari penelitiannya adalah faktor sosial ekonomi dan populasi desa berpengaruh terhadap Keuangan Inklusi. Faktor perbankan, deposit dan kredit berpengaruh terhadap keuangan inklusi. koran, rasio credit-deposit tidak berpengaruh terhadap keuangan inklusi.

Bintan Badriatul Ummah (2013) dalam penelitiannya yang berjudul *Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan dengan pembangunan di Asia* menunjukkan PDRB PerKapita dan populasi mempengaruhi inklusi keuangan.

Atikah (2016) *Analisis Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh terhadap Keuangan Inklusif di Daerah Istimewa Yogyakarta. Angka melek huruf dan rasio jalan berpengaruh negatif terhadap inklusi keuangan.

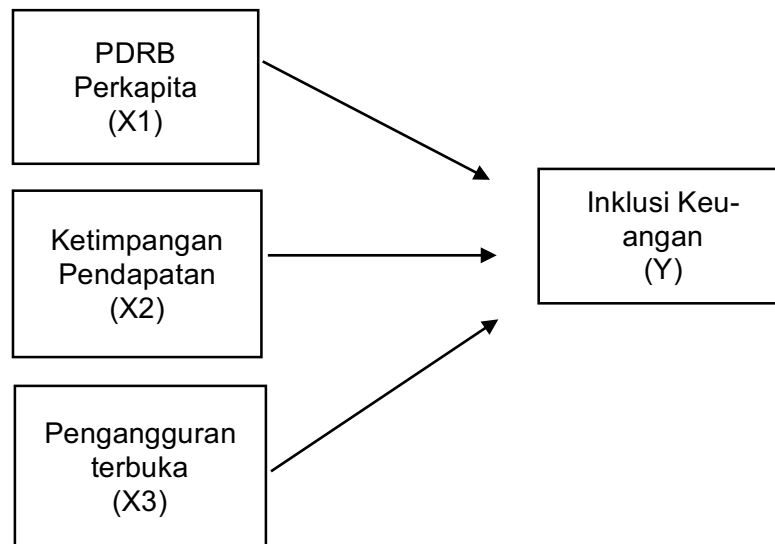
Bintan Badriatul Ummah (2015) dengan penelitian yang berjudul *“Analisis Inklusi Keuangan dan Pemerataan Pendapatan di Indonesia”*. Penelitian ini menganalisis Inklusi Keuangan dan pemerataan pendapatan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel tobit dengan cross section 33 provinsi dan tahun dasar analisis 2007-2011 melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan sosial ekonomi dan pendekatan infrastruktur. Sedangkan hubungan inklusi keuangan dengan pemerataan pendapatan di Indonesia dianalisis dengan Kausalitas Engle-Granger pada panel data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat inklusi keuangan di Indonesia masih tergolong rendah, yang ditunjukkan dengan nilai indeks inklusi keuangan kurang dari 0,3. Berbeda dari hipotesis penelitian, ketimpangan pendapatan yang semakin lebar mengakibatkan inklusi keuangan di Indonesia semakin tinggi. Dari pendekatan infrastruktur, jumlah pengguna telepon seluler dan internet mempengaruhi tingkat inklusi keuangan di Indonesia. Ketimpangan pendapatan dengan inklusi keuangan memiliki hubungan satu arah dimana ketimpangan pendapatan mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia tetapi tidak sebaliknya. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, seperti money mobile, dapat mengurangi hambatan geografis sehingga meningkatkan inklusi keuangan.

Yana Raudhtul Jannah dan David Kaluge (2019) dengan penelitian berjudul "Analisis Variabel sosial ekonomi terhadap Tingkat Inklusi Keuangan Negara Asia tahun 2010-2015". Penelitian ini menyimpulkan bahwa GDP per Kapita tidak berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan sedangkan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk desa berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan.

2.4 Kerangka pikir penelitian

Berdasarkan latar belakang, tinjauan teoritis, dan kajian empiris yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menguji faktor faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan di Indonesia.



Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap permasalahan yang menjadi objek penelitian. Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

1. PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia tahun 2019 dan 2022.
2. Ketimpangan Pendapatan berpengaruh negatif terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia tahun 2019 dan 2022.
3. Pengangguran Terbuka berpengaruh negatif terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia tahun 2019 dan 2022.